

RUANG PUBLIK DI PRAJA MANGKUNEGARAN MASA MANGKUNEGARA VII

Nila Kintaningtyas¹, Djono, Nur Fatah Abidin²

Abstract

This research aims to analyze: (1) The development of public spaces in Praja Mangkunegaran during the reign of Mangkunegara VII (2) Community activities in public spaces in the Praja Mangkunegaran area during the reign of Mangkunegara VII. This research uses the historical method or historical method which has four steps, including the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The data used in the research were collected using literature study techniques that used archives obtained from the Mangkunegaran Reksa Pustaka Library, newspapers, magazines, journal articles, and books. The data analysis process was carried out by conducting internal and external criticism on the sources that had been found. The interpretation process is carried out by interpreting and integrating data sources and arranged chronologically. The historiography process is the stage of writing events chronologically according to the data sources found and compiled using proper language.

The conclusions obtained from the research results are: (1) The existence of public space in Praja Mangkunegaran especially during the reign of Mangkunegara VII, was influenced by modernization by maintaining the concept of "mimicry" in order to reduce the dominance of the colonizers. Public spaces in Praja Mangkunegaran also originated from private spaces which then turned into public spaces so that the general public could use them for various activities; (2) Ethical politics that occurred in Praja Mangkunegaran became a contributing factor to the existence of public spaces in Praja Mangkunegaran because it created native elites who upheld nationalism so that many discussions and congresses took place in public spaces. Public activities that can be found in the public spaces of Praja Mangkunegaran include ceremonial events, political activities, and cultural activities.

Keywords: *public spaces, modernization, community activities, Mangkunegaran*

PENDAHULUAN

Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari masih berbentuk kota tradisional, masuk ke dalam kota kolonial, hingga menjadi kota modern seperti saat ini. Perkembangan Kota Surakarta tidak dapat lepas dari berbagai macam permasalahan kota seperti masalah lingkungan, pola tata ruang kota, hingga masalah sosial masyarakat (Margana and

¹ Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret

² Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret

Nursam, 2010: 1). Keberadaan Kota Surakarta tidak dapat lepas dari sebuah peristiwa besar antara etnis Tionghoa dengan kolonial Belanda yang dikenal dengan *Geger Pacinan* pada tahun 1740 yang berhasil mengguncang pulau Jawa. Kerajaan Mataram Islam yang pada masa itu sedang berkuasa di Keraton Kartasura turut terlibat dalam pemberontakan tersebut hingga harus berpindah ke Dusun Sala pada 1746. Dusun inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari Kota Surakarta saat ini yang di dalamnya juga terdapat berbagai macam permasalahan (Ricklefs, 2009: 207-208).

Setelah melalui Perjanjian Giyanti di tahun 1755 yang memisahkan dua kerajaan besar yakni Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Surakarta serta Perjanjian Salatiga di tahun 1757 yang memunculkan Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman, maka Kota Surakarta memiliki dua penguasa lokal yakni Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran (Mangkunegaran, 1976: 149-151). Sejak awal berdiri, Kadipaten Mangkunegaran atau Praja Mangkunegaran terus berusaha agar tanah *apanage* yang dimilikinya dapat berubah menjadi tanah *precario* (dapat diwariskan), serta berusaha agar dapat lepas dari bawah bayang-bayang kekuasaan Kasunanan Surakarta (Dalyana, 1939: 22).

Praja Mangkunegaran juga harus menghadapi kekuatan modernisasi sebagai akibat dari zaman yang terus berkembang. Pemikiran yang inovatif dan kreatif sangat dibutuhkan dalam proses modernisasi agar Praja Mangkunegaran yang menjadi salah satu pusat kebudayaan Jawa dapat berjalan beriringan dengan zaman yang semakin modern. Praja Mangkunegaran memang berhasil dalam menghilangkan tradisi-tradisi ala tradisional Jawa yang telah dinilai sudah tidak relevan, namun masih tetap dapat mempertahankan sifat ke-Jawaannya (Rinkes, 1927: 12-13).

Modernisasi di Praja Mangkunegaran mencapai puncaknya ketika berada di bawah pemerintahan Mangkunegara VII yang berkuasa sejak tahun 1916 hingga tahun 1944. Modernisasi berhasil masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat di Praja Mangkunegaran, sehingga pembaharuan terus-menerus dilaksanakan karena Mangkunegara VII ingin masyarakatnya hidup dengan lebih sejahtera lagi. Dana yang cukup besar kemudian dikucurkan demi membangun

berbagai macam fasilitas beserta ruang-ruang publik di wilayah Praja Mangkunegaran, dengan harapan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih mudah baik secara individu maupun dalam kelompok (Larson, 1990: 105).

Modernisasi yang terjadi di Praja Mangkunegaran tidak lepas dari peran Mangkunegara VII yang sebelumnya memiliki pengalaman studi di Leiden di Belanda. Selama berada di Belanda, beliau menyempatkan diri untuk melihat-lihat dan membandingkan bagaimana kondisi fisik perkotaan antara kota-kota yang berada di Belanda dengan di wilayah Praja Mangkunegaran yang ternyata turut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Suryasuparta, 1916).

Keberadaan ruang publik di suatu wilayah perkotaan menjadi salah satu konsep ilmu sosial yang cukup populer karena memiliki hubungan yang erat dengan teori demokrasi. Ruang-ruang publik menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial akibat aktivitas yang terjadi di dalamnya. Masyarakat yang beraktivitas di dalamnya dapat mengubah praktik sosiokultural hingga praktik sosio-politis. Ruang publik juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat agar dapat mengekspresikan diri (Hardiman, 2010: 1).

Pola tata ruang kota tradisional ala Jawa tentu tidak mengenal bagaimana konsep ruang publik ala Barat. Baru ketika pihak kolonial Belanda datang dan kemudian menghadirkan ruang-ruang baru bagi masyarakat, konsep ruang publik di Kota Surakarta pun semakin berkembang. *Alun-alun* menjadi salah satu ruang terbuka yang menjadi ciri khas pusat pemerintahan tradisional di Kota Surakarta yang masih bertahan hingga saat ini (Sunaryo *et al.*, 2013: 77). *Alun-alun* selain menjadi simbol legitimasi kekuasaan seorang raja juga menjadi ruang fungsional yang dapat digunakan untuk berbagai macam acara baik yang berupa *ceremonial*, kegiatan politik, maupun tradisi kebudayaan.

Alun-alun yang menjadi ruang terbuka justru tidak dapat ditemukan di Praja Mangkunegaran. Berbagai macam aktivitas masyarakat yang seharusnya dapat dilakukan di *alun-alun* justru tidak nampak pula di Praja Mangkunegaran. Praja Mangkunegaran yang berhasil menyesuaikan diri dengan modernisasi harus dapat memunculkan ruang-ruang publik baru sehingga masyarakat dapat memiliki

“wadah” tersendiri dalam menuangkan ide terbaru maupun mengeluarkan ekspresi kreatif yang belum pernah ada sebelumnya.

KAJIAN TEORI

Terdapat tiga kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat membantu proses analisa dalam upaya menelusuri dan mengungkapkan mengenai perkembangan keberadaan dan aktivitas masyarakat di dalam ruang publik di Praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara VII. Ketiga kajian teori antara lain sebagai berikut:

1. Kota

Kota dalam Bahasa Sanskerta disebut dengan ‘*kotta*’, ‘*kuta*’, atau ‘*kita*’ yang berarti kubu maupun benteng (Meinarno, 2011: 221). Kota dapat diartikan sebagai sistem kehidupan manusia dengan melihat jumlah penduduk yang tinggi yang didalamnya terdapat berbagai macam strata sosial dengan corak yang lebih materialistis (Bintarto, 1983: 36). Kota juga dapat diartikan sebagai permukiman masyarakat dengan angka kependudukan tinggi, yang didukung dengan mayoritas mata pencaharian non-agraris dengan tata kelola tanah yang beraneka ragam, serta gedung-gedung yang lokasinya berdekatan serta terdapat fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, fasilitas perekonomian, dan lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengatur kehidupan kemasyarakatan (Basundoro, 2012: 5).

Pembagian bahasan mengenai ruang lingkup kota di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yakni kota secara kronologis melihat ruang lingkup kota melalui periodisasi maupun pembabakan zaman antara lain era kota tradisional yang pola tata ruang kota masih berdasarkan konsep makrokosmos dan mikrokosmos, era kota kolonial yang ditandai dengan adanya pengaruh dari pemerintah kolonial dalam bangunan-bangunannya, dan era kota pasca kolonial yang berlangsung setelah pihak kolonial Belanda tidak lagi berkuasa di Indonesia. Pembagian bahasan yang kedua adalah pembahasan kota secara tematik yang membahas kota dengan teori ilmu-ilmu sosial yang lain (Basundoro, 2012: 9-12).

Konsep tata ruang kota berdasarkan kosmologi Jawa dibagi menjadi empat bagian utama. Empat konsep tersebut antara lain *Mancapat* yang membagi kota

menjadi empat bagian sesuai dengan arah mata angin utama, *Mancalima* yang menghubungkan keempat bagian kota yang menghasilkan satu pusat kota yang utama, *Catur Gatra Tunggal* yang menata pusat kota yang dilengkapi dengan keraton, masjid, *alun-alun*, dan pasar, dan yang terakhir adalah *Kiblat Papat Lima Pancer* yang mempertimbangkan arah pembangunan keraton sebagai pusat kota (Lombard, 2005: 100-102).

2. Ruang Publik

Kata '*publicus*' dalam Bahasa Belanda yang memiliki arti milik rakyat sebagai alat politis atau sesuai dengan masyarakat merupakan asal muasal dari kata 'publik'. '*Publicus*' juga dapat memiliki arti sebagai 'ruang' yang bersifat umum maupun sebagai subjek hukum. Pada zaman Yunani dan Romawi, ruang-ruang biasa berada di luar rumah seperti pada *alun-alun*, arena teater, maupun di jalanan (Hardiman, 2010: 2-4).

Ruang publik mengacu pada dimensi fisik yang terdapat pada wilayah-wilayah tertentu. Ruang publik dapat digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dirancang secara sederhana, dapat diakses oleh seluruh individu, ada pertemuan yang tidak direncanakan, serta perilaku individu yang sopan satu dengan lainnya. Ruang publik juga dapat memiliki fitur masing-masing sehingga setiap ruang publik memiliki fungsi yang berbeda satu dengan lainnya (Beng-Huat, 1992: 2).

Ruang publik memiliki hubungan dengan *Sprachgemeinschaft* yakni komunitas-komunitas bahasa dan *sensus communis* yakni akal sehat manusia yang pada akhirnya membentuk suatu ruang sosial yang berasal dari komunikasi dan juga interaksi antar individu (Habermas, 1993: 2-3). Ruang publik juga erat kaitannya dengan ruang elit politis atau yang dikenal dengan sebutan *bürgerliche Öffentlichkeit* atau ruang publik borjuis. Salon dan kafetaria di Jerman seringkali dijadikan tempat untuk debat dan diskusi mengenai dunia perpolitikan (Habermas, 1993: 86). Tidak hanya para borjuis yang dapat mengikuti debat politik yang kerap mengkritik pemerintahan, namun masyarakat sipil dapat ikut serta dalam forum-forum yang difasilitasi oleh surat-surat kabar maupun lembar berita (Sastrapratedja, 2010: 270-271). Selain berfungsi sebagai ruang debat dan diskusi, ruang publik juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi untuk sekedar melepas penat, untuk

bekerja, bersantai, beribadah, berolahraga, bahkan dapat digunakan sebagai tempat berjualan dan berbelanja (Krier, 1991: 15-17).

3. Modernisasi

Modernisasi berasal dari bahasa latin yakni *'modo'* dan *'ermus'* yang masing-masing memiliki arti cara dan masa kini. Modernisasi dapat diartikan sebagai proses menuju masyarakat yang lebih modern (Muin, 2006: 20). Koentjaraningrat menjelaskan bahwa modernisasi adalah upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan hidup dengan kondisi dunia pada saat ini dengan cara mengubah sifat dan mentalitas manusia (Koentjaraningrat, 1974: 140-141).

Menurut Harol Rosenberg, yang dimaksud dengan modernisasi adalah adanya tradisi baru yang menjadi akibat dari adanya urbanisasi yang mengikis sifat pedesaan pada masyarakat (Syani, 2015: 174). Modernisasi juga diartikan sebagai perubahan yang terjadi di masyarakat yang melingkupi aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang disebabkan dengan adanya pengetahuan ilmiah yang berasal dari akulturasi (Schoorl and Soekadijo, 1991: 4-9). Modernisasi dapat dilihat dari perubahan dalam masyarakat seperti budaya tradisional yang lama-kelamaan digantikan oleh budaya baru, munculnya kelompok-kelompok baru dalam masyarakat, serta mata pencaharian yang semakin beragam (Martono, 2011: 83).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berlangsung sejak bulan Maret hingga bulan Oktober 2023 dilaksanakan di berbagai tempat di Kota Surakarta seperti di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran Surakarta, dan Monumen Pers Kota Surakarta. Penelitian yang memiliki judul "*Ruang Publik di Praja Mangkunegaran masa Mangkunegara VII*" menggunakan metode penelitian historis atau sejarah dengan menggunakan pendekatan multidimensional.

Pendekatan multidimensional yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu sosiologi yang berhubungan dengan struktur masyarakat, sistem

politik, pola kelakuan, dan interaksi sosial yang terjadi di Praja Mangkunegaran masa pemerintahan Mangkunegara VII dan pendekatan kultural yang berfokus pada fenomena moral, adab, dan etika yang terjadi di ruang-ruang publik Praja Mangkunegaran. Metode penelitian historis digunakan dalam penelitian ini karena dapat mempermudah proses rekonstruksi dan analisis peristiwa pada masa lampau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Sumber primer yang digunakan berupa bundel arsip mengenai *Societeit Mangkunegaran* dan *Partini Tuin* di Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran, surat kabar dan majalah mengenai ruang publik di Praja Mangkunegaran masa pemerintahan Mangkunegara VII. Sumber sekunder penelitian berasal dari buku yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Praja Mangkunegaran masa Mangkunegara VII.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa teknik analisis secara historis. Analisis historis dilakukan dengan menyiapkan kerangka berpikir yang didalamnya termuat konsep dan teori yang digunakan dalam menghasilkan suatu data. Data tersebut kemudian diinterpretasi sesuai dengan teori yang telah digunakan sehingga dapat menghasilkan fakta secara relevan (Kartodirjo, 1992: 12). Prosedur penelitian dilakukan dengan cara heuristik (pengumpulan sumber), kritik ekstern dan intern (terhadap sumber yang telah ditemukan), interpretasi (pemberian makna terhadap fakta sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praja Mangkunegaran

Geger Pecinan yang terjadi pada tahun 1740 menjadi peristiwa yang mengawali perpecahan yang terjadi di Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Adanya konflik kepentingan di internal Kerajaan Mataram Islam berhasil menciptakan koalisi-koalisi antara Mataram dengan Tionghoa maupun Mataram dengan pihak kolonial Belanda (Daradjadi, 2008: 148-160). Keraton Kartasura yang menjadi pusat pemerintahan bagi Kerajaan Mataram Islam terkena dampak dari adanya pemberontakan tersebut sehingga mau tidak mau harus mengungsi ke daerah arah

timur di sekitar wilayah Ponorogo dan kemudian berpindah lagi di Desa Sala pada tahun 1746 (Ricklefs, 2009: 207-208).

Pada tahun 1755 terjadi sebuah Perjanjian Giyanti yang memisahkan Kerajaan Mataram Islam menjadi dua kekuasaan besar yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian yang menghasilkan wilayah kekuasaan baru kembali terjadi pada tahun 1757 melalui Perjanjian Salatiga, yang menjadi awal berdirinya Kadipaten Mangkunegaran dan juga Kadipaten Pakualaman yang masih berada di bawah dua penguasa sebelumnya (Mangkunegaran, 1976: 149-151). Kadipaten Mangkunegaran atau Praja Mangkunegaran berdiri di atas tanah *apanage* yang dipimpin oleh KGPAA Mangkunegara I yang memperjuangkan status tanah dan status Praja Mangkunegaran agar menjadi tanah *precario* dan memiliki kedudukan yang sama dengan Kasunanan Surakarta.

Modernisasi di Praja Mangkunegaran mulai terjadi pada pemerintahan Mangkunegara II yang dibuktikan dengan keberadaan Legiun Mangkunegaran yang merupakan bagian dari dinas militer milik kolonial Belanda, dimana seragam militer dan latihan militer mengadopsi dari kebudayaan Barat (Kumar, 2008: 6). Modernisasi berlanjut pada pemerintahan Mangkunegara IV yang terlihat dari tatanan birokrasinya yang berubah dan disederhanakan. Pembaharuan di bidang perekonomian juga terlihat dengan kemunculan pabrik-pabrik gula yang dapat memulihkan perekonomian Praja Mangkunegaran (Wasino, 2014: 260).

Pada masa pemerintahan Mangkunegara VI, Praja Mangkunegaran berhasil lepas dari bawah bayang-bayang kekuasaan Kasunanan Surakarta sehingga kewajiban Praja Mangkunegaran terhadap Kasunanan sudah tidak berlaku. Pada masa tersebut pula, keuangan dan kas semakin dibenahi sehingga perekonomian Praja Mangkunegaran mengalami kemajuan (M. Metz, 1939: 7).

Modernisasi di Praja Mangkunegaran mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Mangkunegara VII yang dimulai pada tahun 1916. Mangkunegara VII yang sempat menempuh studi di Kota Leiden mendapatkan pemahaman-pemahaman baru mengenai pembangunan tata ruang kota yang baik dan modern (*Het Triwindoe-Gedenboek Mangkoe Nagoro VII*, 1939: 14). Kota-kota di Jawa yang pernah beliau singgahi ternyata masih sangat tertinggal jauh daripada kota-

kota yang pernah beliau datangi di Negeri Belanda. Kondisi fisik perkotaan ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya (Suryasuparta, 1916).

Mangkunegara VII dikenal sangat aktif dalam organisasi-organisasi yang diikutinya, sehingga banyak sekali ide-ide inovatif dan pemikiran kritis yang berhasil membuat Praja Mangkunegaran mengalami kemajuan. Mangkunegara VII merupakan sosok yang dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Mangkunegara VII kerap menjalin kerja sama dengan pihak kolonial Belanda yang dinilai dapat menguntungkan masyarakat dan Praja Mangkunegaran (Larson, 1990: 103).

Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di Praja Mangkunegaran mengalami modernisasi pada masa pemerintahan Mangkunegara VII. Pada bidang pendidikan terlihat dari berdirinya sekolah seperti *Algemeene Nederlasch Verbond*, *Algemeene Midebare School*, *Solosche van Deventer Vereeniging*, *Christelijke Mulo*, *Koningin Wilhemina School*, dan *Neutrale HIS*. Pemberian *Studiefonds* yang merupakan beasiswa untuk bersekolah juga gencar dilakukan di Praja Mangkunegaran. Pada bidang kesehatan, sumur yang merupakan sumber air semakin diperhatikan agar tidak tercemar dengan air kotor, dibangunnya *Ponten Ngebrusan* yang berfungsi sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus bagi masyarakat Praja Mangkunegaran. Rumah dan rumah-rumah sakit diperbaiki sehingga lebih layak untuk digunakan. Jalur-jalur irigasi untuk pertanian dan kebun milik Praja Mangkunegaran juga menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur. Begitu pula dengan pembangunan jembatan dan jalan yang semakin mempermudah arus transportasi dari atau menuju Praja Mangkunegaran (M. Metz, 1939: 66-72).

Ruang-ruang publik baik yang berbentuk ruang terbuka maupun gedung-gedung juga menjadi perhatian penting oleh Mangkunegara VII. Hal tersebut dikarenakan melalui ruang-ruang publik, cara berpikir masyarakat yang terlibat pada aktivitas-aktivitas tertentu akan mengalami perubahan akibat kontak sosial yang terjadi di dalamnya. Masyarakat yang awalnya masih memiliki pola pikir pralogis akan memiliki pola pikir yang lebih logis dan modern.

B. Ruang Publik di Praja Mangkunegaran

Pola tata ruang tradisional Jawa tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar seperti dari agama Hindu, Buddha, Islam, Tionghoa, bahkan dari Eropa. Konsepsi religius dan filosofis negara-negara lain di Asia Tenggara juga menjadi salah satu pengaruh bagi konsepsi pola tata ruang kota tradisional Jawa (Anderson, 1972: 1-3). Persamaan konsepsi tersebut terlihat dari kepercayaan terhadap makrokosmos dan mikrokosmos dalam pembangunan tata ruang kota baik di negara-negara Asia Tenggara dan juga kota tradisional Jawa. Istana atau keraton kerajaan menjadi pusat magis dari wilayah-wilayah yang berada di sekelilingnya (Heine-Geldern, 1982: 2-6).

Pada masa Kerajaan Mataram Islam hingga terbentuknya Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, pola tata ruang kota tradisional Jawa masih digunakan dengan unsur-unsur kota yang masih dipertahankan seperti keraton, *alun-alun*, pasar, dan juga masjid (Santoso, 1984). Pola tata ruang kota Praja Mangkunegaran memiliki perbedaan karena mendapatkan pengaruh dari kolonial Belanda. Hal tersebut tampak pada pola tata ruang kota Praja Mangkunegaran yang memiliki pola *grid* dengan jalan besar menjadi jalan utama (*Groote weg*) yang menjadi pemisah lahan yang digunakan untuk membagi wilayah pertahanan, permukiman, perekonomian, dan perindustrian. Keberadaan taman-taman kecil di pertigaan maupun perempatan jalan, gedung-gedung besar untuk klub dan administrasi yang berjejer di jalan utama, dan arena olahraga menjadi salah satu contoh adanya pengaruh tata ruang kota dari kolonial Belanda yang diterapkan di wilayah Praja Mangkunegaran (Pemberton, 2003: 172).

Herman Thomas Karsten adalah salah satu sosok arsitek yang turut andil dalam pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Mangkunegara VII. Thomas Karsten merancang bangunan yang berada di Praja Mangkunegaran yang menggunakan teknik perancangan bangunan ala bangsa Barat namun masih mempertahankan kebudayaan Jawa agar dapat bertahan dengan kebudayaan bangsa-bangsa Timur yang lain dalam menentukan nasibnya sendiri (Sunarmi, 2005: 62-63). Thomas Karsten dan Mangkunegara VII juga memperhatikan sistem pengairan serta ruang-ruang terbuka hijau di Praja Mangkunegaran.

Istilah ‘publik’ dalam masa tradisional Jawa sejatinya baru muncul pada tahun 1916, yakni dalam ‘*swarha piblik tercetak*’ yang memiliki arti suara publik yang tercetak (*Kabar Wulanan Tijdschrift Waradarma*, 1916). Istilah ‘publik’ yang mengacu pada ‘*wong umum*’ atau keberadaan orang banyak baru ditemukan pada tahun 1939 (Poerwadarminta, 1939). Jauh sebelum itu, ruang-ruang publik di kota tradisional Surakarta telah menunjukkan eksistensinya. *Alun-alun* dan Taman Sriwedari menjadi salah satu contoh ruang publik yang hadir di Kota Surakarta terkhusus berada di wilayah Kasunanan Surakarta (Soeratman, 1989: 40). *Alun-alun* menjadi salah satu simbol legitimasi kekuasaan seorang raja yang juga memiliki fungsi sebagai tempat berlatih bagi kesatuan militer tradisional juga diadakannya tradisi seperti *Rampog Macan* (Sunaryo *et al.*, 2013: 79). Taman Sriwedari mulai dapat diakses oleh masyarakat umum pada tahun 1913, dengan mempersembahkan agenda rutin seperti *kethoprak*, *malam selikuran*, dan juga wayang orang (Kartodikromo, 1918: 25).

Keberadaan ruang publik di Praja Mangkunegaran tidak dapat lepas dari adanya Politik Etis yang mampu mengubah pola pikir masyarakat tradisional melalui pendidikan sehingga dapat menghasilkan golongan terpelajar (Ricklefs, 2009: 329-330). Golongan terpelajar inilah yang nantinya akan meramaikan aktivitas di ruang publik sehingga ruang-ruang publik di Praja Mangkunegaran semakin menjamur. Pertemuan dan kongres semakin sering dilaksanakan di ruang-ruang publik Praja Mangkunegaran. Ruang publik di Praja Mangkunegaran mengadopsi konsep “mimikri”, dimana Mangkunegara VII memperbanyak ruang publik bukan karena ingin bergantung pada pihak kolonial dengan mengikuti gaya bangunan, tetapi justru menjadi strategi dalam mengurangi dominasi pihak kolonial karena ruang-ruang publik yang dibangun banyak diisi dengan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa (Bhabha, 1994: 86).

Ruang publik di Praja Mangkunegaran pada masa Mangkunegara VII kemudian dibagi berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalamnya seperti kegiatan *ceremonial*, kegiatan politik, dan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Kegiatan yang berhubungan *ceremonial* lebih sering dilaksanakan di area Pura Mangkunegaran terutama di area *pendhapa* dan area *pamédan*.

Pada area *pendhapa*, aktivitas yang paling sering dilakukan adalah tradisi rutin seperti menjadi tempat untuk menerima tamu agung, tempat pengambilan sumpah pegawai dan perwira, tempat diadakannya acara *tingalan wiyosan jumenengan dalem* dan *slametan* yang merupakan upacara untuk memperingati kenaikan tahta raja, acara *khol* atau upacara peringatan wafatnya Mangkunegara I, dan tempat untuk berlatih dan menampilkan seni tari terutama Langendriyan Mangkunegaran. Acara *Pasamuwan* juga dilakukan di *pendhapa* dengan dihadiri tidak hanya perwakilan adat tetapi juga anak-anak secara umum. Permainan kartu, pesta dansa, penampilan wayang orang, hingga bioskop gratis menjadi acara hiburan dalam acara tersebut (*Surat Kabar De Preangerbode*, 1924).

Jubileumfeesten Soerakarta yang terjadi di tahun yang sama yakni pada tahun 1923 sebagai peringatan 25 tahun Ratu Wilhelmina naik takhta, *ceremonial* juga terjadi begitu mewah di area Pura Mangkunegaran. Pesta rakyat tersebut dapat dihadiri oleh masyarakat umum dengan membeli tiket seharga *f-1*. Hiburan seperti pesta kembang api, parade pasukan Legiun Mangkunegaran memeriahkan acara tersebut (*1898-1923 Jubileumfeesten Soerakarta; 31 Augustus-6 September: Algemeen Programma*, 1923). Pada tahun 1939 berlangsung sebuah acara yang bernama *Triwindoe Feest Mangkoenagoro* sebagai festival delapan tahunan. Pada festival tersebut, Tari Bedoyo dan Tari Langendriyan ditampilkan sebagai salah satu hiburan selain wayang orang. Masyarakat dan tamu undangan yang hadir pada festival tersebut dapat menari bersama di *pendhapa* Pura Mangkunegaran (*De Locomotief*, 1939).

Societeit Mangkoenegaran, Bangsal Prangwedanan, dan Kepatihan Mangkunegaran menjadi dua ruang publik di Praja Mangkunegaran yang kerap dijadikan sebagai tempat diskusi maupun kongres yang berhubungan dengan dunia perpolitikan (*Bundel Masalah Soos [Tempat Pertemuan] P. 2258*, 1937). Kelompok Insulinde tercatat pernah melakukan diskusi di *Societeit Mangkoenegaran* pada 25 Oktober 1918. Ikatan Pegawai Pengairan dan Bangunan Air Indonesia atau V.I.P.I.W. juga pernah melakukan kongres besar di *Societeit Mangkoenegaran* pada tahun 1933. Disusul dengan kongres yang diadakan oleh P.K.S.B. (*Perhimpoean Kaoem Sekardja Boschewzen*) pada 27 April 1941 (*De*

Indische Courant, 1941). Pada Bangsal Prangwedanan, diadakan sebuah pertemuan rutin yang dilakukan oleh *Wijsgerig Studie Kring* pada tahun 1931 yang membahas mengenai budaya-budaya Jawa.

Kepatihan Mangkunegaran menjadi ruang bagi pelaksanaan propaganda kebudayaan Jawa yang dilakukan oleh perkumpulan kesenian Jawa yang bernama *Javaansche Kunstkring Mardiraras*. Propaganda tersebut dilakukan dengan menyebarkan musik *klenengan* yang dapat didengar saat acara *gerebeg* maupun *sekaten*. *Klenengan* tersebut juga dijadikan sebagai musik pengiring bagi tarian tradisional yang ditampilkan di *Partini Tuin*. Kepatihan Mangkunegaran sebagai pusat penyiaran mampu menjadi simbol legitimasi seorang raja karena dapat menarik perhatian masyarakat (*SRV (Solosche Radio Vereeniging) Gedenkboek*, 1936). Kepatihan Mangkunegaran pada 7 Juli 1918 juga pernah menjadi ‘tuan rumah’ bagi *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* yang menjadi cikal bakal dari organisasi *Java Institute* yang fokus pada pengembangan kebudayaan Jawa (*De Indische Courant*, 1929).

Partini Tuin adalah ruang *private* milik Praja Mangkunegaran yang pada masa pemerintahan Mangkunegara VII berubah menjadi ruang publik karena mulai dapat diakses oleh masyarakat umum sejak tahun 1918. *Partini Tuin* menjadi salah satu ruang publik yang berfungsi sebagai tempat untuk ‘*nguri-uri*’ budaya Jawa di Praja Mangkunegaran. Hal tersebut terlihat dari kegiatan wayang orang dan tarian yang selalu ditampilkan di *Partini Tuin* pada hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. *Partini Tuin* juga menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat umum karena terdapat tempat pemandian umum dan olahraga air (*De Locomotief*, 1927).

Perkembangan ruang publik dan aktivitas di Praja Mangkunegaran tidak berhenti di masa pemerintahan Mangkunegara VII saja. Seiring berkembangnya waktu dan pergantian kepemimpinan, ruang publik di Praja Mangkunegaran turut berubah sesuai dengan perkembangan zaman, entah semakin berkembang atau justru kehilangan eksistensi sebagai ruang publik. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi politik di Indonesia yang terus bergejolak, terlebih lagi setelah mengalami Revolusi Nasional Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, ruang publik dalam kota tradisional berbeda dengan ruang publik ala perkotaan bangsa barat, meskipun memiliki fungsi yang sama. Ruang publik kota tradisional yang dapat ditemui di Kota Surakarta adalah *alun-alun* dan Taman Sriwedari yang dimiliki oleh Kasunanan Surakarta. Untuk Praja Mangkunegaran, kehadiran ruang publik tidak lepas dari modernisasi pada masa pemerintahan Mangkunegara VII dan Politik Etis yang menghasilkan *elite-elite* pribumi yang nantinya akan memunculkan ruang-ruang publik karena kebutuhan akan “wadah” yang digunakan untuk diskusi dan melakukan kongres. Kebutuhan tersebut kemudian direalisasikan dengan memunculkan ruang-ruang publik sendiri dengan menggunakan konsep “mimikri” dari bangsa barat agar dapat meredam dominasi penjajahan.

Kedua, hasil dari konsep tersebut dapat terlihat dari munculnya ruang-ruang publik di Praja Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara VII berupa area Pura Mangkunegaran yang digunakan untuk acara-acara *ceremonial*. Terdapat pula Kepatihan Mangkunegaran, *Societeit Mangkoenegaran*, serta Bangsal Prangwedanan yang berfungsi sebagai tempat diskusi dan kongres di bidang pendidikan, kebudayaan, dan perpolitikan. *Partini Tuin* yang digunakan sebagai tempat pelestarian budaya hingga tempat rekreasi.

Daftar Pustaka

1898-1923 *Jubileumfeesten Soerakarta; 31 Augustus-6 September: Algemeen Programma* (1923).

Anderson, B. R. O. (1972) ‘The Idea of Power in Javanese Culture’, in Holt, C. (ed.) *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University, pp. 1–69.

Basundoro, P. (2012) *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Beng-Huat, C. (1992) *Public Space: Design, Use, and Management*. Singapore: Singapore University Press.

- Bhabha, H. K. (1994) *The Location of Culture*. New York: Routledge.
- Bintarto, R. (1983) *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bundel Masalah Soos [Tempat Pertemuan] P. 2258* (1937). Surakarta.
- Dalyana, M. (1939) *Ketataprajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko.
- Daradjadi (2008) *Perang Sepanjang 1740-1743: Tionghoa-Jawa Lawan VOC*. Jakarta: Publishing Eksekutif.
- De Indische Courant* (1929) 'Wetenschappen. Het Java-Instituut', 31 December.
- De Indische Courant* (1941) 'Congresbesluiten P.K.S.B', 29 April.
- De Locomotief* (1927) 'Vooruitgang van den Partini-tuin', 27 August.
- De Locomotief* (1939) 'Triwindoe-Feest Mangkoenagoro', 31 May.
- Habermas, J. (1993) *The Structural Transformation of the Public Sphere (An Inquiry into a Category of Bourgeois Society)*. Massachusetts: The MIT Press.
- Hardiman, F. B. (2010) *Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heine-Geldern, R. (1982) *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: Rajawali.
- Het Triwindoe-Gedenboek Mangkoe Nagoro VII* (1939). Soerakarta: Comite voor het Triwindoe-Gedenkboek.
- Kartodikromo, M. (1918) *Student Hidjo*. Surakarta: Sinar Hindia.
- Kartodirjo, S. (1992) *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat (1974) *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Krier, R. (1991) *Urban Space*. London: Academy Editions.
- Kumar, A. (2008) *Prajurit Perempuan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Larson, G. . (1990) *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di*

Surakarta 1912-1914. Yogyakarta: UGM Press.

Lombard, D. (2005) *Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid 3 Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M. Metz, T. (1939) *Mangkunegaran: Analisis Sebuah Kerajaan Jawa*. Surakarta: Reksa Pustaka Mangkunegaran.

Mangkunegaran, P. (1976) *Serat Babad Panambangan*. Surakarta.

Margana, S. and Nursam (2010) *Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Martono, N. (2011) *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Press.

Meinarno, E. A. (2011) *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.

Muin, I. (2006) *Sosiologi Jilid III*. Jakarta: Erlangga.

Pemberton, J. (2003) *Jawa: On The Subject Of Java*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Poerwadarminta, W. J. S. (1939) *Baoesastra Djawa*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N. V. Groningen.

Ricklefs, M. C. (2009) *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.

Rinkes, D. D. A. (1927) 'De Mangkoenegaran', in *Djawa: Drie Maandelijksch Tijdschrift Orgaan Van Het Java-Instituut*. Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko.

Santoso, S. J. (1984) *Konsep Struktur & Bentuk Kota Jawa s/d Abad 18*. Institut Teknologi Bandung.

Sastrapratedja, M. (2010) 'Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Tinjauan Kebudayaan', in *Ruang Publik: Melacak 'Partisipasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.

Schoorl, J. W. and Soekadijo, R. G. (1991) *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soeratman, D. (1989) *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Penerbit Tamansiswa.

SRV (*Solosche Sadio Vereeniging*) *Gedenkboek* (1936). Surakarta: Reksa Pustaka

Mangkunegaran.

Sunarmi (2005) *Interior Pracimasaya di Pura Mangkunegaran Surakarta: Karya Budaya Mangkunegara VII (Kajian Estetik)*. Surakarta: UNS Press.

Sunaryo, R. G. *et al.* (2013) 'Colonial and Traditional Urban Space in Java: A Morphological Study of Ten Cities', *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 40(2), pp. 77–88. doi: DOI: 10.9744/dimensi.40.1.77-88.

Surat Kabar De Preangerbode (1924) 'Surat Kabar De Preangerbode'.

Suryasuparta, R. M. A. (1916) *Sêrat Cariyos Kêkesahan Saking Tanah Jawi Dhatêng Nagari Walandi*. Wêltêphrèdhên.

Syani, A. (2015) *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasino (2014) *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1869-1944*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

(1916) 'Kabar Wulanan Tijdschrift Waradarma'. Available at: <https://www.sastra.org/koran-majalah-dan-jurnal/umum/2981-waradarma-wirapustaka-dan-reksadipraja-1916-05-908?s=publik>.